



**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

**RANCANGAN AKHIR
RENJA 2025**





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR ~~124~~ TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

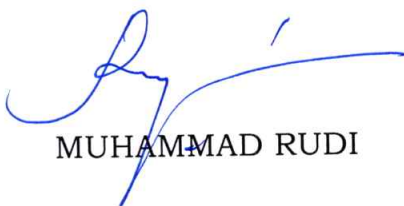
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JERRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1464

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam TA. 2025 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam Tahun 2025 disusun mengacu dan konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah sebagaimana dalam rancangan Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2021-2026. Tatkala penting yang menjadi fokus penyusunannya agar selaras dengan tugas fungsi Dinas serta program prioritas Kepala Daerah terhadap pembangunan daerah Kota Batam.

Dalam dokumen perencanaan, Renja PD merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Batam, 12 Juli 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BATAM



REZA KHADAFY.S.STP.,MPA.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 1980061919999121002

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	4
I.1 Latar Belakang	4
I.1.1 Pengertian Renja PD	4
I.1.2 Proses Penyusunan Renja PD	4
I.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
I.2 Landasan Hukum.....	6
I.3 Maksud dan Tujuan	8
I.3.1. Maksud Penyusunan Renja PD.....	8
I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD	8
I.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25	
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	25
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	25
2.3.3 Peluang dan Tantangan	26
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD	28
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	63
BAB V. PENUTUP.....	86
5.1. Catatan Penting.....	86
5.2. Kaidah Pelaksanaan	86
3.3. Rencana Tindaklanjuti	86

Daftar Tabel

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024 Kota Batam	16
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Batam.....	24
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Batam.....	30
Tabel 3.2.1 Tujuan DPMPTSP Kota Batam	41
Tabel 3.2.2 Sasaran DPMPTSP Kota Batam	41
Tabel 3.2.3 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Batam.....	42
Tabel 3.2.4 Penjabaran Pelaksanaan Pada DPMPTSP Kota Batam	42
Tabel 3.2.5 Kegiatan Prioritas DPMPTSP Kota Batam sesuai dengan janji Walikota dan Wakilwalikota terpilih.....	43
Tabel 3.2.6 Tujuan DPMPTSP Kota Batam sesuai dengan TPB/SDG.....	45
Tabel 3.2.7 Sasaran dan Program/Kegiatan/Subkegiatan DPMPTSP Kota Batam.....	46
Tabel T-C.32 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam.....	50

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Renja PD

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam kurun waktu 5 (lima) sebagaimana tertuang di dokumen perencanaan Rencana Strategis. Renja DPMPTSP Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja disusun sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dan Pasal 5 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, berpedoman dengan Renstra PD dan RKPD sesuai dengan tugas fungsi DPMPTSP Kota Batam berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

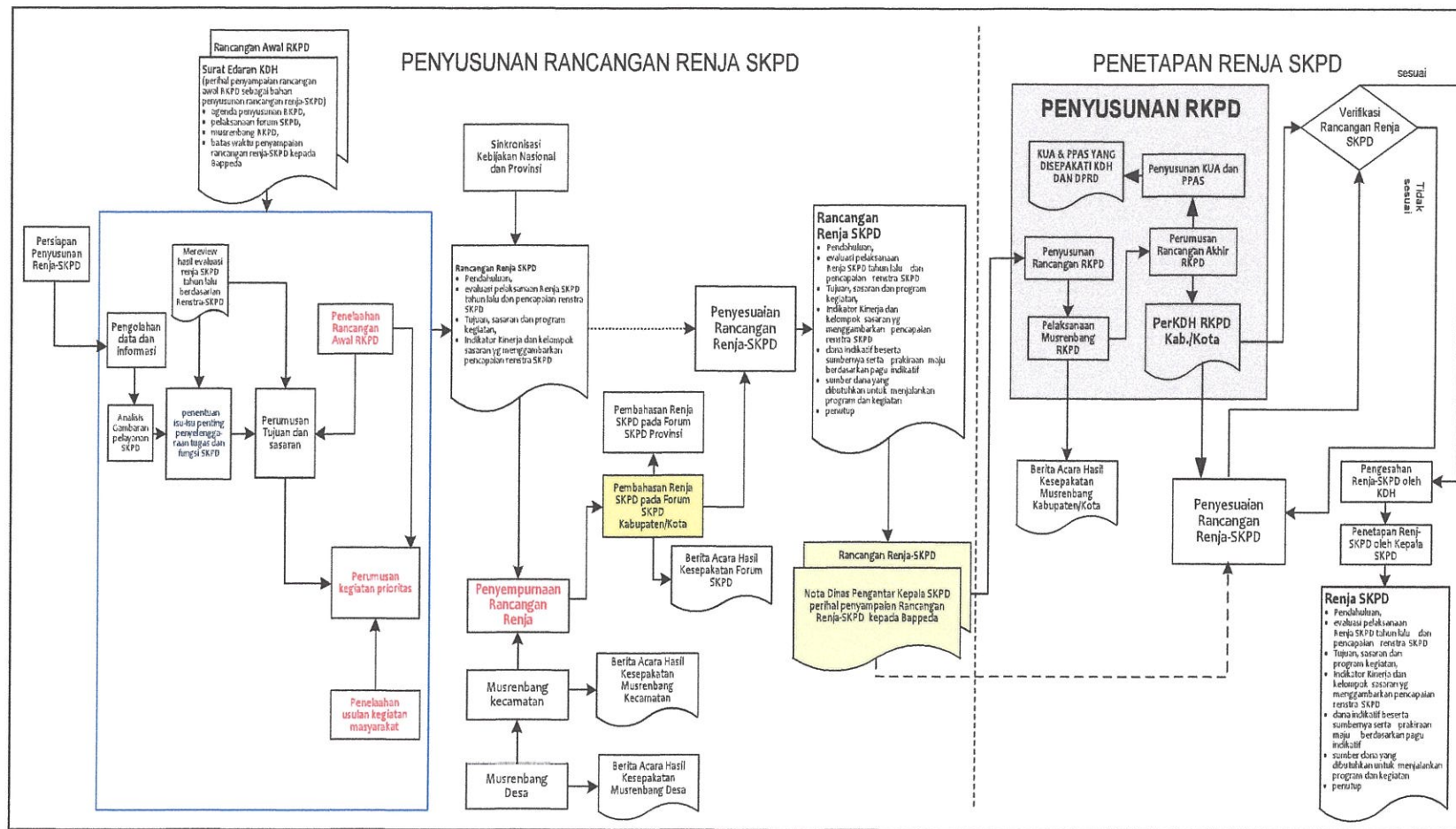
Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

I.1.2 Proses Penyusunan Renja PD

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

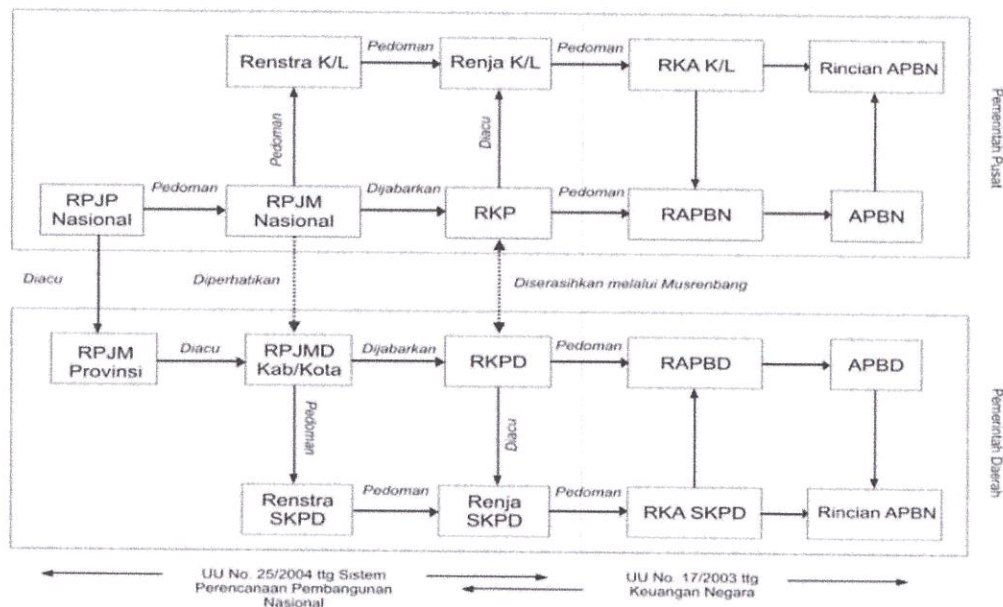
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.



Gambar I.1.2 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

I.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Batam Periode 2021 - 2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Propinsi Kepulauan Riau/ Pada lingkup pemerintahan, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



Gambar I.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen lainnya

I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
18. Peraturan Walikota Batam RKPD tahun 2025; Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024, Tanggal 4 Juli 2024 (Berita Daerah Nomor 1423)
19. Peraturan Walikota RKPD Perubahan 2024; Nomor 84 Tahun 2024, Tanggal 11 Juli 2024 (Berita Daerah Nomor 1424)

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja PD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2025.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. Serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Kewenangan Perangkat Daerah, ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, dan ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya.

I.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini dijelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang susunan garis besar isi dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2021 – 2026 dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NPSK, maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan tingkat kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan, peluang dan tantangan, serta isu-isu penting/strategis pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Bagian ini berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, serta tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel T-C.33.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan rencana kegiatan dan program serta target untuk Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Kota Batam Tahun 2025 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Di tahun 2024 DPMPTSP Kota Batam melaksanakan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp14.914.721.068.

Di Tahun 2024 DPMPTSP Kota Batam menyusun anggaran untuk mencapai 2 (dua) sasaran organisasi yakni, Sasaran 1) Meningkatnya realisasi investasi, dengan target indikator kinerja **Jumlah Realisasi Investasi (Rp4 T)** dan; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, dengan target indikator kinerja **Persentase Penurunan Pengaduan Layanan oleh Masyarakat (5%)**.

Selanjutnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 DPMPTSP Kota Batam dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp14.914.721.068 melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 9.567.241.474 *outcome* kinerja yakni: Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah

- ditetapkan (2 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 2 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. (0) *outcome* kinerja yakni: Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi (100%);
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp396.065.000, *outcome* kinerja kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (6 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 6 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp (0), *outcome* kegiatan yakni: Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (1 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 1 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp2.110.638.960 memiliki *outcome* yaitu: Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp936.877.000, *outcome* kinerja yakni: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi dengan target kinerja (100%), dimana

rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp284.530.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Rp284.530.000, *outcome* kegiatan ini yakni: Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang Dipenuhi dengan target kinerja (45%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah dokumen yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang seharusnya disusun);

III. Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp339.300.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp339.300.000, *outcome* kegiatan ini yakni: Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan dengan target kinerja (90%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan).

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp387.514.412 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp387.514.412, *outcome* kegiatan ini yakni: Tingkat

Ketepatan Waktu Responsif Berjalannya Proses Perizinan, Konsultasi, dan Pengaduan dengan target kinerja (90%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah izin terbit sesuai SOP dibagi jumlah seluruh izin terbit).

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp468.857.588 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp468.857.588, *outcome* kegiatan ini yakni: Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM dengan target kinerja (10%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah realisasi LKPM dibagi dengan jumlah target).

VI. Program Pengendalian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Rp90.500.000, *outcome* kegiatan ini yakni: Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM dengan target kinerja (10%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan

Sebagaimana dalam penjelasan yang telah diuraikan di atas, secara rinci, dan sekaligus merupakan gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Batam

Tabel T-C.29

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1			2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase kegiatan urusan yang terpenuhi	100%	100%	100%	200%	100%	100%	100%	100.00	
2	18	01	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	100%	100%	116,78%	100%	100%	100%	100.00	
2	18	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB	532 OB	532 OB	1.635 OB	538 OB	532 OB	321 OB	100.00

2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Dokumen	276 Dokumen	324 Dokumen	954 Dokumen	324 Dokumen	324 Dokumen	0	100.00
2	1	0	2	0	5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	1 Dokumen	0	1	1	1	1	0	100.00
2	1	0	2	0	5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45 Stel	0	104 Stel	63 Stel	104 Stel	0	0	100.00
2	1	0	2	0	5	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 ASN	0	6 ASN	2 ASN	6 ASN	6 ASN	0	100.00
2	1	0	2	0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90%	90%	90%	144,45%	90%	90%	100%	100.00
2	1	0	2	0	6	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	7 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100.00
2	1	0	2	0	6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	132 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100.00
2	1	0	2	0	6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0	100.00
2	1	0	2	0	6	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	1 Paket	7 Jenis	6 Jenis	7 jenis	7 Jenis	5 Jenis	100.00

2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	42 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	100.00
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	94 Laporan	94 Laporan	198 Laporan	94 Laporan	94 Laporan	30 Laporan	100.00
2	1	0	2	0	7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	93 Unit	9 Unit	14 Unit	40 Unit	14 Unit	14 Unit	0	100.00
2	1	0	2	0	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Jenis	36 Jenis	36 Jenis	84 Jenis	36 Jenis	36 Jenis	6 Laporan	100.00
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 Jenis	12 Jenis	24Jenis	42 Jenis	24 Jenis	24 Jenis	3 Laporan	100.00
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	140 Laporan	140 Laporan	140 Laporan	140 Laporan	140 Laporan	140 Laporan	140 Laporan	100.00

2	18	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00
2	18	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	5 Unit	6 Unit	26 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100.00
2	18	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Unit	84 Unit	84 Unit	214 Unit	84 Unit	84 Unit	56 Unit	100.00
2	18	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Tingkat Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5%	0	5%	5%	5 %	5%	0	100.00
2	18	02	2	02	Kegiatan embuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	8%	0	8%	8%	8%	8%	0	100.00
2	18	02	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	2 Kajian	0	2 kajian	1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	0	100.00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase tingkat minat investasi	90%	90%	90%	90 %	90 %	95%	100%	100.00
2	18	03	2	01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Jumlah Pengunjung Pameran Penanaman Modal, Rata-rata	208.152 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	100.00

							pengunjung media informasi promosi investasi									
2	18	03	2	01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100.00	
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	90%	90%	90%	90%	90 %	90%	0,92	100.00	
2	18	04	2	01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Ketepatan waktu responsif berjalannya proses perizinan konsultasi dan pengaduan	90%	90%	90%	188%	90 %	90%	0,92	100.00	
2	18	04	2	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	2388 Pelaku Usaha	3000Pelaku Usaha	98.499 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	6451 Pelaku Usaha	100.00	
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	100.00	

2	1	0	2	0	1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Daerah	Jumlah data investasi yang dikelola	10%	10 %	10%	50.74 %	10%	10%	0,43	100.00
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang Mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	30 Kegiatan Usaha	4 Laporan	4 Laporan	1.436 Laporan	4 Laporrn	4 Laporan	0	100.00
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Orang	234 orang	200 Pelaku Usaha	570 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	0	100.00
2	1	0	2	0	3	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	70%	70%	70%	70%	70 %	70%	0,25	100.00
2	1	0	2	0	1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; Evaluasi pengembangan sistim informasi yang dilaksanakan	4 Kali	4 kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 kali	0,80	100.00
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan	5000 Izin	4500 Izin	4500 Izin	4500 Izin	4500 Izin	5000 Izin	426 Dokumen	100.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pada bagian ini diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebaga berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Realisasi Investasi

Indikator Kinerja Utama

I. Kenaikan Realisasi Investasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dan 2023

Target realisasi investasi di tahun 2022 adalah Rp3.000.000.000.000 dan target realisasi pada Penetapan Kinerja Perubahan Dinas sebesar Rp13.238.639.305.445 dengan capaian realisasi sebesar Rp2.521.304.800 Tahun 2022 sampai dengan triwulan III realisasi investasi sebesar Rp Rp2.521.304.800 yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar dan PMA sebesar Rp10.717.334.505.455 Setelah triwulan IV dirilis oleh BKPM maka realisasi investasi mencapai Rp.12.704.205.000.000 dengan realisasi investasi PMDN sebesar Rp.5.182.580.000.000 dan PMA sebesar Rp.7.522.226.000.000. Jika dibandingkan capaian realisasi investasi antara tahun 2022 dan 2023 maka ada kenaikan capaian, akan tetapi pencapain realisasi investasi di Renja tahun 2023 tetap melebihi target. Peningkatan realisasi investasi yang sangat besar dan signifikan ini dikarenakan adanya penghitungan realisasi investasi tidak hanya menghitung realisasi investasi PMDN saja, namun juga menghitung realisasi investasi PMA yang merupakan bagian dari keseluruhan investasi di daerah. Cara penghitungan realisasi investasi ini dilakukan untuk mengetahui keseluruhan realisasi investasi yang ada di daerah dan dapat dipakai sebagai tolok ukur kemajuan maupun kemunduran perekonomian daerah dan meningkatnya jumlah serapan

tenaga kerja serta berkurangnya jumlah angka pengangguran di daerah.

- II. Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara regular

Realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 24.41%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%. Peningkatan realisasi capaian ini dikarenakan fungsi pembinaan dan pengawasan di DPMPSTSP Kota Batam telah berjalan dengan sangat optimal.

- III. Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan

Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebesar 5%, dimana diharapkan adanya penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat sebanyak 5%. Realisasi yang dicapai adalah 100%, yang artinya pengaduan layanan oleh masyarakat di DPMPSTSP Kota Batam telah 100% memenuhi target.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan

Indikator Kinerja Utama

- I. Persentase Jenis Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online
Target persentase perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai waktu SOP di tahun 2023 sebanyak 90% dengan capaian realisasi sebanyak 88%. Namun untuk jumlah perizinan yang diterbitkan melampaui target, dimana untuk jumlah perizinan bidang ekonomi dan sosial yang diterbitkan mencapai 40375 izin dengan target 40000 izin dan jumlah perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang diterbitkan mencapai 4023 izin dengan target 5000 izin.
- II. Indeks Kepuasan Masyarakat
Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah IKM A dan realisasi yang dicapai adalah IKM A dengan nilai 89.43%. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit Pelayanan berada dalam mutu kategori Sangat Baik.

Tabel T-C.30

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam

No	Indikator	SPM/St andar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Kenaikan Realisasi Investasi			Rp3 T	Rp3 T	Rp4 T	Rp4 T	Rp13.238. 639.305.4 55	Rp. 12.704.205.000.000	Rp4 T	Rp4 T	
2	Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara Reguler			10%	10%	10%	10%	22.41%	30.64%	10%	10%	
3	Menurunnya Persentase Aduan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan			5%	5%	5%	5%	100%	100%	5%	5%	
4	Persentase Jenis Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online			90%	90%	90%	90%	88%	89 ,43 %	90%	90%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			A	A	A	A	A	A	A	A	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2023 yang masuk kategori “Sangat Berhasil” yakni realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan adalah:

- a. Indikator Kinerja Realisasi Investasi, di tahun 2023 mencapai Rp.12.704.205.000.000.
- b. Indikator Kinerja Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan, di tahun 2023 mencapai 44398 Izin meliputi perizinan melalui aplikasi EASY, OSS, dan SIMBG (non berusaha yang belum ada di OSS).

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2023 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah umum dan permasalahan yang tidak terprediksi yaitu:

- a. Sulit menghubungi dan bertemu penanggungjawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- b. Ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena kekurangan personil back office untuk penelitian teknis berkas permohonan izin yang masuk;
- c. Keterlambatan pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi bagi jenis perizinan yang dikenai retribusi, yang berakumulasi dengan rentang waktu penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP;
- d. Dalam proses pengaktifan izin dengan komitmen masih ada yang dilakukan secara manual dan membutuhkan jenjang alur yang panjang;
- e. Adanya ketidaksesuaian data *scan* yang diinput oleh pemohon, sehingga memperlambat proses verifikasi berkas;
- f. Pelimpahan izin belum dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi dan belum dilakukan penyesuaian tupoksi DPMPSTP Kota Batam;
- g. Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai perlu

waktu yang lebih lama untuk melakukan pengecekan jumlah izin terbit tepat waktu.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesejangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di tahun sebelumnya, agar dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Faktor internal tersebut dapat berupa kekuatan (*strenghts*) dan berupa kelemahan (*weaknesses*).

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Isu strategis ini merupakan faktor pendukung dan pemacu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD, dan faktor kekuatan yang dimiliki DPMPSTP Kota Batam adalah:

- a. Letak geografis yang strategis;
- b. Bangunan gedung yang cukup memadai;
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal;
- e. Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penanaman modal dan PTSP.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Disiplin dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih rendah;
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan sub urusan PTSP;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

II. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Faktor eksternal yang menjadi peluang (*Opportunities*) adalah sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis ini merupakan isu strategis yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Beberapa isu strategis yang menjadi faktor peluang (*opportunities*) DPMPSTP Kota Batam adalah :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional;
- b. Penerapan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi OSS RBA (*Risk Based Approach*);
- c. Minat pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Batam semakin tinggi;
- d. Iklim investasi di daerah yang kondusif;
- e. Merupakan daerah industri yang memiliki zona KEK dalam rangka memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi investor yang menanam modalnya di zona KEK;

- f. Pertumbuhan UMKM di Kota Batam yang mampu menyerap tenaga kerja;
- g. Penyediaan data potensi dan peluang investasi yang merupakan modal pelaksanaan promosi secara optimal dan tepat sasaran;
- h. Tersedianya tempat dan *event* pameran skala nasional dalam rangka promosi peluang investasi Kota Batam.

2. Ancaman (Threats)

Isu strategis faktor eksternal yang menjadi Ancaman (*threats*) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD yang merupakan kendala maupun penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi yang terus mengalami perubahan yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan;
- b. Rendahnya antusias masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan usahanya;

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain:

- 1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penyusunan data potensi peluang investasi daerah, secara khusus di 12 (dua belas) Kecamatan;
- 2. Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari Bendahara pengeluaran, PPTK, KPA dan PPK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas;
- 3. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);

4. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan mutu/kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (*Risk Based Approach*);
6. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
7. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
8. Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
9. Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;
10. Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan;

Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2025;
2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPTSP Kota Batam dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

2.4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Batam

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	17.076.008.851	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase kegiatan urusan yang terpenuhi	100%	17.076.008.851	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan dan monitoring anggaran yang dilaksanakan	100%	40.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan dan monitoring anggaran yang dilaksanakan	100%	40.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100 %	11.028.548.396	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	11.028.548.396	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Batam	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB	11.028.548.396	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB	11.028.548.396	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90%	597.224.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90%	597.224.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	5.750.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.750.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Paket	163.178.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	163.178.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	660 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	660 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	19.465.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	19.465.000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	366.851.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	366.851.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	1.311.184.395	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	1.311.184.395	
Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	6.921.000	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	6.921.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 Unit	474.122.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	474.122.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	830.141.395	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	830.141.395	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	2.925.974.560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100 %	2.925.974.560	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	1.572.960.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	1.572.960.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	72.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	72.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	416 Laporan	1.281.014.560	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	416 Laporan	1.281.014.560	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	1.173.077.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	1.173.077.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	300.000.000	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	230.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	230.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	643.077.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	643.077.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Batam	Tingkat Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5%	580.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Batam	Tingkat Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	5%	580.000.000	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif	0	280.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif	0	280.000.000	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Pananaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Dokumen	280.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Pananaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Dokumen	280.000.000	

	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Dokumen Perencana Penanaman Modal yang dipenuhi	5%	300.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Dokumen Perencana Penanaman Modal yang dipenuhi	5%	300.000.000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase kepmintaan investasi	95%	460.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Kepeminatan Investasi	95%	460.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	64%	460.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	64%	460.000.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	460.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	460.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	95%	550.0000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	95%	550.0000.000	

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Tingkat ketepatan waktu responsive berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan	90%	550.0000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Tingkat ketepatan waktu responsive berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan	90%	550.0000.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	2.800.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	2.800.000	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Batam	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	254.073.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Batam	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	254.073.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	293.127.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	293.127.000	

	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Batam	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	473.850.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Batam	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	473.850.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	473.850.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	473.850.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	450.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Batam	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	450.000.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	23.850.000	Pengawasan Penanaman Modal	Batam	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	23.850.000	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase ketersediaan data investasi secara real time	80%	90.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Batam	Persentase ketersediaan data investasi secara real time	80%	90.000.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan	4 Kali	90.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan	4 Kali	90.000.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Batam	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokumen	90.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Batam	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokumen	90.000.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan	4 Kali	90.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan	4 Kali	90.000.000	

2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu juga menyelaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam tahun peralihan antara RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 dan RPJMD Kota Batam periode 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berperan aktif agar pembangunan daerah Kota Batam dapat mencapai target tujuan RPJMD Kota Batam dan lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Batam.

Dalam kesempatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mendukung Visi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia yang Madani, Modern dan Sejahtera” yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi dimana DPMPTSP Kota Batam melaksanakan 2 misi yaitu misi 1 (kesatu) yaitu “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah” dan misi 5 (kelima) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam disusun mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Batam dan kebijakan nasional yaitu program skala prioritas nasional. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator kinerja diarahkan untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan;

2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu **Meningkatnya Realisasi Investasi**.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu “Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibidang pelayanan Satu Atap” melalui tujuan yaitu :

- Meningkatkan Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan

Tabel. 3.2.1

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024
1	Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam dan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	10%
2		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dibidang pelayanan perizinan satu atap	IKM A

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah “Meningkatnya realisasi investasi dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan” melalui :

- a. Realisasi Investasi;
- b. Sertifikasi ISO Pelayanan Publik dan Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat.

Tabel. 3.2.2

Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realiasi Investasi	Rp4.000.000.000.000

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Sertifikasi ISO Pelayanan Publik	Tersertifikasi ISO 9001
		Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat	5%

Tabel. 3.2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Kenaikan Realisasi Investasi	10%
2	Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara reguler	10%
3	Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan	5%
4	Persentase Jenis Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online	90%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM A

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Berdasarkan visi kepala daerah Kota Batam tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”. Guna mewujudkan Visi Kota Batam ditetapkan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2.4
Penjabaran Pelaksanaan pada DPMPTSP

Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	
1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian,	1.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam

perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing	
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	
5.1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditentukan, selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Batam, maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah.

Berikut kegiatan prioritas untuk DPMPTSP sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disinkronkan dengan program pembangunan daerah:

Tabel. 3.2.5
Kegiatan Prioritas DPMPTSP sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

Program Prioritas	Kegiatan Unggulam	Program Pembangunan
Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	I. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi, BP Batam, dan dunia usaha dalam rangka memberikan kemudahan fasilitas investasi dan Promosi.	Program Promosi Penanaman Modal
	II. Meningkatkan dan memperkuat	Program Pelayanan Penanaman Modal

	kinerja pelayanan perizinan melalui penguatan SDM dan Teknologi Informasi.	
	III. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha sebagai stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	IV. Menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi melalui fasilitasi sarana pendukung investasi di bidang lahan, infrastruktur dasar dan utilitas serta dukungan aspek legal.	Program Promosi Penanaman Modal

2. Pencapaian SDGs

Dalam rangka menyelaraskan program pembangunan jangka menengah Kota Batam tahun 2021-2026 dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), maka Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk mendukung menetapkan arah kebijakan yang secara konkrit dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan. Pencapaian TPB/SDG’s langsung diterapkan pada sejumlah

program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan pilar TPB/SDGs.

Adapun program prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDG's) adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. 3.2.6
Tujuan DPMPTSP sesuai dengan TPB/SDG

Tujuan	Program Pembangunan dalam RPJMD
Pilar Pembangunan Ekonomi	
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Pencapaian Program Skala Prioritas Nasional

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan target yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 5/2021, PP Nomor 6/2021 dan PP Nomor 9/2021, dimana PTSP sedang didorong untuk memberikan layanan perizinan yang cepat, tepat dan mudah bagi pelaku usaha dan memberikan kepastian dalam pemberian layanan, sehingga tercipta iklim investasi yang melayani dan meningkatkan realisasi investasi di daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Implementasi penggunaan aplikasi OSS RBA segera dioptimalkan dalam proses permohonan perizinan dan penanaman modal di daerah.

4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Untuk memperkenalkan potensi investasi di Kota Batam disemua sector perlu adanya promosi yang dilakukan baik keikutsertaan

dalam pameran dan sejenisnya di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Program yang mendukung antara lain adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal. Diharapkan dengan pelaksanaan promosi secara optimal melalui berbagai media yang ada maka akan dapat meningkatkan nilai investasi di Kota Batam.

5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam sebesar 10%, dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan pencapaian nilai IKM A. untuk mencapai target ini perlu dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung peningkatan realisasi investasi disetiap tahunnya yaitu dengan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Penanaman Modal, sedangkan untuk mencapai nilai IKM A dibidang pelayanan perizinan maka dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal.

Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mencapai visi misi diatas maka, Renja DPMPTSP Tahun 2025 terdapat 5 program wajib dan 1 program penunjang, 6 kegiatan wajib dan 7 kegiatan penunjang serta 10 sub kegiatan wajib dan 21 sub kegiatan penunjang, sehingga total 31 sub kegiatan.

Tabel. 3.2.7.

Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya realisasi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Program Promosi Penanaman Modal
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistim Pelayanan Perizinn Berusahan Terintegrasi Secara Elektronik
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperiiznan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi secara Elektronik

Tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel T-C.33

Tabel T-C.32.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Batam

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

lembar 1 dari 12

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				19.229.858.851				89.310.455.663
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Batam	100%	17.076.008.851			100%	79.152.864.859
2	18	01	1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan monitoring anggaran yang dilaksanakan		100%	40.000.000			100%	40.000.000
2	18	01	1.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	20.000.000

lembar 2 dari 12

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01	1.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	20.000.000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi		100%	11.028.548.396			100%	21.928.986.504
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		532 OB	11.028.548.396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		532 OB	11.028.548.396
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		324 Dokumen	-			324 Dokumen	10.900.438.108
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD		90%	597.224.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90%	4.279.679.000
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		2 Paket	5.750.500	PENDAPATAN ASLI		2 Paket	5.750.500

					Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang disediakan				DAERAH (PAD)			
lembar 3 dari 12													
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		32 Paket	163.178.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32 Paket	163.178.000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		660 Paket	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		660 Paket	0
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		2 Paket	5,750,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	5.750.000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		32 Paket	163,178,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32 Paket	163.178.000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang		660 Paket	0	PENDAPATAN ASLI		660 Paket	0

						Disediakan				DAERAH (PAD)			
lembar 4 dari 12													
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		5 Paket	19.465.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	19.465.000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12 Dokumen	1.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	1.800.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		94 Laporan	366.851.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94 Laporan	4.089.486.000

2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi		100%	1.311.184.395			100%	1.137.062.395
lembar 5 dari 12													
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	6.921.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		3 Unit	6.921.000
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		35 Unit	474.122.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		20 Unit	300.000.000
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	830.141.395	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Unit	830.141.395
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi		100%	7.477.235.205			100%	47.248.148.960

2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		24 Laporan	1.572.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Laporan	901.500.0000
lembar 6 dari 12													
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12 Laporan	72.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	90.000.000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		416 Laporan	1.281.014.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		416 Laporan	46.256.648.960
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	1.173.077.000			100%	4.518.988.000

2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	2.542.250.000
lembar 7 dari 12													
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		13 Unit	230.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	1.374.738.000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	643.077.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	602.000.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti		5%	580.000.000			5%	2.007.457.404
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang	Persentase pelaku usaha yang memperoleh insentif		0%	280.000.000			0%	1.884.163.840

					Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi		5%	300.000.000			30%	123.293.564
lembar 8 dari 12													
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kepeminatan investasi		95%	460.000.000			95%	2.386.438.520
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan		64%	460.000.000			64%	2.386.438.520
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP		95 %	550.000.000			95%	3.300.500.000

2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat ketepatan waktu responsive berjalannya proses perizinan, konsultasi, dan pengaduan		90 %	550.000.000			95%	3.300.500.000
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		5000 Pelaku Usaha	2.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5000 Pelaku Usaha	5.800.000
lembar 9 dari 12													
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha		240 Pelaku Usaha	254.073.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240 Pelaku Usaha	3.040.627.000

						Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		100 Kegiatan Usaha	293.127.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Kegiatan Usaha	254.073.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM		10 %	473.850.000			10 %	1.926.732.000

lembar 10 dari 12

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu		10 %	473.850.000			10 %	1.926.732.000
2	18	05	2.01	0001	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan		200 Pelaku Usaha	450.000.000	DAK Non Fisik		200 Pelaku Usaha	1.876.732.000

						Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							
2	18	05	2.01	0003	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		120 Kegiatan Usaha	23.850.000	DAK Non Fisik		200 Kegiatan Usaha	50.000.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara real time		80 %	90.000.000			90 %	536.462.880
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan		4 Kali	90.000.000			4 Kali	536.462.880
lembar 11 dari 12													
Kode				Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		

					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal							
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		3000 Dokumen	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3000 Dokumen	536.462.880

lembar 12 dari 12

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja dan Pendanaan PD dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Indikator Tujuan : 1).Tingkat pertumbuhan investasi	10%	10%		15%		20%		20%		25%		25%		DPMPTSP	Batam
		Indikator Sasaran : 1).Realisasi investasi	Rp 3 T	Rp 3 T		Rp 3 T		Rp 4 T		Rp 4 T		Rp 5 T		Rp 5 T		DPMPTSP	Batam
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Izin Investasi yang ditindakan juti	5%	5%	111,000,000	5%	114,818,400	5%	118,905,935	5%	123,293,564	5%	128,015,708	30%	714,123,447	DPMPTSP	Batam

	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh insentif	0	0%	0	8%	314,818,400	8%	618,905,935	8%	173,293,564	8%	178,015,708	16%	1,285,033,607	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	-	0	-	1 Dokumen	600,000,000	0	-	0	-	1 Dokumen	600,000,000	DPMPTSP	Batam

2	Penanam an Modal																
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanam an Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	0	0	0	1 Doku men	200,000, 000	1 Doku men	500,000, 000	10 Kegia tan	50,000,0 00	10 Kegia tan	50,000,0 00	2 Doku men; 20 Kegia tan	800,000,00 0	DPMPTSP	Batam

	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi (jumlah dokumen yg disusun/jml dokumen yg seharusnya disusun)	5%	30%	111,000,000	45%	114,818,400	50%	118,905,935	65%	123,293,564	100%	128,015,708	100%	607,923,447	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	0	2 Dokumen	118,089,840	DPMPTSP	Batam

	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	1 Doku men	111,000,000	1 Doku men	114,818,400	1 Doku men	118,905,935	1 Doku men	123,293,564	1 Doku men	128,015,708	5 Doku men	596,033,607	DPMPTSP	Batam
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kepemilikan investasi	90%	90%	309,477,000	90%	320,123,009	95%	331,519,388	95%	343,752,453	95%	356,918,172	95%	1,807,435,782	DPMPTSP	Batam
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	90%	90%	309,477,000	90%	320,123,009	95%	331,519,388	95%	343,752,453	78%	356,918,172	78%	1,661,790,022	DPMPTSP	Batam

	Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Belum dikerjakan	1 Doku men	78,334,240.0	1 Doku men	70,123,009.0	1 Doku men	81,519,388.0	1 Doku men	78,752,453.0	1 Doku men	106,918,172.0	1 Doku men	415,647,262	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Belum dilaksanakan; 2 Kali; 2 Kali ;	1 Doku men	231,142,760	1 Doku men	250,000,000	2 Doku men	250,000,000	2 Doku men	265,000,000	2 Doku men	250,000,000	8 Doku men	1,246,142,760	DPMPTSP	Batam
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	10%	319,790,800	10%	330,791,604	10%	342,567,785	10%	355,208,536	10%	368,813,023	60%	2,043,293,747	DPMPTSP	Batam

	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Daerah	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	10%	319,780,800	10%	330,791,604	10%	342,567,785	10%	355,208,536	10%	368,813,023		1,717,161,748	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Laporan	500 Kegiatan Usaha	130,000,000	500 Pelaku Usaha	38,000,000	700 Pelaku Usaha	130,000,000	800 Pelaku Usaha	130,000,000	1000 Pelaku Usaha	130,000,000	8 Laporan; 3.000 Pelaku Usaha	558,000,000	DPMPTSP	Batam

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang Mendapatkan pembinaan pelaksanaan Penanaman modal	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	59,780,800	200 Pelaku Usaha	148,791,604	200 Pelaku Usaha	82,567,785	200 Pelaku Usaha	95,208,536	200 Pelaku Usaha	108,813,023	1200 Pelaku Usaha	495,161,748	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1200 Izin/SIUP	120 Izin / SIUP	130,000,000	120 Izin/ SIUP	144,000,000	120 Izin / SIUP	130,000,000	120 Izin / SIUP	130,000,000	120 Izin / SIUP	130,000,000	120 Izin / SIUP	664,000,000	DPMPTSP	Batam
		Indikator Tujuan: 2).Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan Satu Atap	IKM A	IKM A		IKM A		IKM A		IKM A		IKM A		IKM A		DPMPTSP	Batam

		Indikator Sasaran: 1).Sertifikasi ISO Pelayanan Publik	A	A		Terse rtifik asi ISO 9001		Terse rtifik asi ISO 9001		Terse rtifik asi ISO 9001		Terse rtifik asi ISO 9001		Terse rtifik asi ISO 9001		DPMPTSP	Batam
		Indikator Sasaran: 2).Persentase Penurunan Pengaduan Layanan oleh Masyarakat	5%	5%		5%		5%		5%		5%		5%		DPMPTSP	Batam
	Program Pelayana n Penanam an Modal	Persentase Penyelesaia n perizinan sesuai waktu SOP	90.00%	90.0 0%	21,483,0 00	90.0 0%	22,222,0 15	90.0 0%	23,013,1 19	95.0 0%	23,862,2 03	95.0 0%	24,776,2 29	95.0 0%	669,701,78 6	DPMPTSP	Batam

	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu responsif berjalannya proses perizinan, konsultasi dan pengaduan	90%	90%	21,483,000	90%	372,222,015	90%	373,013,119	90%	373,862,303	95%	374,776,229	95%	1,515,356,66	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Pelayanan	90%; 90%	5000 Pelaku Usaha	21,483,000	5000 Pelaku Usaha	22,222,015	5000 Pelaku Usaha	23,013,119	5000 Pelaku Usaha	23,862,303	5000 Pelaku Usaha	24,776,229	90% Izin yang Online; 90% Perseentase Izin yang terbit ;	115,356,666	DPMPTSP	Batam

	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												9000 Pelaku Usaha			
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	46 Aduan; 50 Layanan	200 Orang	0	240 Orang	350,000,000	240 Orang	350,000,000	240 Orang	350,000,000	240 Orang	350,000,000	46 Aduan; 50 Layanan; 960 Orang	1,400,000,000	DPMPTSP	Batam

	Program Pengelol aan Data Dan Sistim Informas i Penanam an Modal	Persentase ketersediaa n data investasi secara realtime	60%	70%	86,500,0 00	70%	89,475,6 00	80%	92,660,9 31	80%	96,080,1 20	90%	99,759,9 88	90%	552,889,51 9	DPMPTSP	Batam
	Kegiatan Pengelol aan Data dan Informas i Perizina n dan Nonperiz inan yang Terintegr asi Pada Tingkat Daerah	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengemban gan sistim informasi perizinan yang dilaksanak an	4 Kali; 1 Kali	4 Kali; 1 Kali	86,500,0 00	4 Kali; 1 Kali	89,475,6 00	4 Kali; 1 Kali	92,660,9 31	4 Kali; 1 Kali	96,080,1 20	4 Kali; 1 Kali	99,759,9 80	4 Kali; 1 Kali	464,476,63 1	DPMPTSP	Batam

	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2100 Izin; 152 Jenis perizinan	3000 Data	86,500,000	3000 Data	89,475,600	3000 Data	92,660,931	3000 Data	96,080,120	3000 Data	99,759,988	4500 Izin; 152 Jenis Perizinan; 3000 Data	464,476,639	DPMPTSP	Batam
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan urusan yang terpenuhi	100%	100%	15,872,985,516	100%	15,872,985,516	100%	15,872,985,516	100%	17,630,963,570	100%	18,306,229,475	100%	98,234,428,021	DPMPTSP	Batam

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan monitoring anggaran yang dilaksanakan	Belum dikerjakan	0	-	0	-	100%	140,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	220,000,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belum dikerjakan	0	-	0	-	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	110,000,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belum dikerjakan	0	-	0	-	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	3 Laporan	110,000,000	DPMPTSP	Batam
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	100%	6,161,870,916	100%	6,161,870,916	100%	6,433,843,416	100%	8,137,921,470	100%	9,579,153,875	100%	36,474,660,593	DPMPTSP	Batam

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB	532 OB	9,612,981,148	532 OB	9,712,981,148	532 OB	9,712,981,148	532 OB	9,804,211,148	532 OB	9,904,211,148	532 OB	48,747,365,740	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Kegiatan	324 Kegiatan	91,230,000	324 Kegiatan	91,230,000	324 Kegiatan	91,230,000	324 Kegiatan	91,230,000	324 Kegiatan	91,230,000	324 Kegiatan	456,150,000	DPMPTSP	Batam
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90%	90%	700,000,000	90%	762,916,500	90%	762,916,500	90%	762,916,500	90%	762,916,500	90%	3,751,666,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Jenis	2 Paket	3,150,000	2 Paket	3,150,000	2 Paket	3,150,000	2 Paket	3,150,000	2 Paket	3,150,000	2 Paket	15,750,000	DPMPTSP	Batam

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang disediakan															
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Jenis	32 Paket	142,323,500	32 Paket	142,323,500	32 Paket	142,323,500	32 Paket	142,323,500	32 Paket	142,323,500	32 Paket	711,617,500	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9724 Jenis	660 Paket	85,914,000	660 Paket	84,084,000	660 Paket	84,084,000	660 Paket	84,084,000	660 Paket	84,084,000	720 Paket	422,250,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	7 Paket	32,750,000	5 Paket	32,750,000	5 Paket	32,750,000	5 Paket	32,750,000	5 Paket	32,750,000	5 Paket	163,750,000	DPMPTSP	Batam

	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Jenis	12 Dokumen	1,800,000	12 Dokumen	1,800,000	12 Dokumen	1,800,000	12 Dokumen	1,800,000	12 Dokumen	1,800,000	12 Dokumen	9,000,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Kali	94 Kali	498,809,000	94 Kali	498,809,000	94 Kali	498,809,000	94 Kali	498,809,000	94 Kali	498,809,000	94 Kali	2,494,045,000	DPMPTSP	Batam
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	8,035,325,600	100%	8,035,325,600	100%	8,035,325,600	100%	8,035,325,600	100%	8,035,325,600	100%	40,176,628,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Kali	24 Laporan	432,000	24 Laporan	432,000	24 Laporan	432,000	24 Laporan	432,000	24 Laporan	432,000	24 Laporan	2,160,000	DPMPTSP	Batam

	Surat Menyurat																
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Jenis	36 Laporan	1,005,033,600	36 Laporan	1,005,033,600	36 Laporan	1,005,033,600	36 Laporan	1,005,033,600	36 Laporan	1,005,033,600	36 Laporan	5,025,168,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 Jenis	24 Laporan	5,416,860,000	24 Laporan	5,416,860,000	24 Laporan	5,416,860,000	24 Laporan	5,416,860,000	24 Laporan	5,416,860,000	24 Laporan	27,084,300,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	372 OB	416 Laporan	1,613,000,000	416 Laporan	1,613,000,000	416 Laporan	1,613,000,000	416 Laporan	1,613,000,000	416 Laporan	1,613,000,000	416 Laporan	8,065,000,000	DPMPTSP	Batam

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	752,500,000	100%	1,311,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	336,000,000	100%	2,999,500,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Buah	1 Buah	12,500,000	2 Buah	32,000,000	-	-	-	-	2 Buah	36,000,000	6 Buah	80,500,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Jenis	12 Unit	200,000,000	14 Unit	250,000,000	20 Unit	300,000,000	20 Unit	300,000,000	20 Unit	300,000,000	93 Unit	1,350,000,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	540,000,000	-	540,000,000	5 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	1,080,000,000	DPMPTSP	Batam

	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	0	-	489,000,000	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	489,000,000	DPMPTSP	Batam
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	100%	223,289,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	1,143,289,000	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak,	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	6 Unit;	6 Unit	92,479,000	6 Unit;	95,000,000	6 Unit;	95,000,000	6 Unit;	95,000,000	6 Unit;	95,000,000	6 Unit;	472,479,000	DPMPTSP	Batam

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	pajak dan perizinannya															
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	84 Unit;	63,310,00	90 Unit;	65,000,00	90 Unit;	65,000,00	90 Unit;	65,000,00	90 Unit;	65,000,00	90 Unit;	323,310,00	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	67,500,00	1 Unit	70,000,00	1 Unit	70,000,00	1 Unit	70,000,00	1 Unit	70,000,00	1 Unit	347,500,00	DPMPTSP	Batam

	Kegiatan Administ rasi Kepegaw alan Perangka t Daerah	Persentase peningkata n disiplin dan kapasitas aparatur yang terpenuhi	0%	100%	0	100%	200,550, 000	100%	110,900, 000	100%	164,800, 000	100%	125,750, 000	100%	602,000,00 0	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	110 Stel	74,800,0 00	0	0	110 Stel	74,800,0 00	0	0	265 Stel	149,600,00 0	DPMPTSP	Batam
	Sub Kegiatan Pendidika n dan Pelatihan Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	3 ASN	90,000,0 00	3 ASN	90,000,0 00	3 ASN	90,000,0 00	3 ASN	90,000,0 00	12 ASN	360,000,00 0	DPMPTSP	Batam

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Hal – hal yang menjadi catatan penting pada penyusunan rencana kerja tahun 2025 yakni program dan kegiatan yang diusulkan merupakan rencana strategis dinas yang terangkum dalam Renstra DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada tahun 2025 diharapkan target rencana kerja dapat terealisasi pada akhir tahun perencanaan. Di tahun 2025 terdapat 2 (dua) agenda penting yakni penyusunan peta potensi investasi yang sebagai salah satu dokumen perencanaan penanaman modal yang berperan penting selain menjadi dasar bahan promosi daerah juga merupakan informasi lengkap tentang potensi investasi Batam, menyediakan berbagai informasi terkait potensi investasi, identifikasi pemetaan potensi investasi yang kesemua informasi tersebut dapat dan layak untuk diunduh pada aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR) BKPM. Selanjutnya tatkala penting Peraturan Daerah tentang Fasilitas/Insentif Pelaku Usaha dan Kemudahan Berusaha yang dilaksanakan di tahun 2024 dapat ditetapkan di tahun 2025 untuk menambah geliat pelaku usaha dalam berinvestasi yang akan berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan Pembangunan Kota Batam yang disempurnakan berdasarkan Peraturan Walikota Batam tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sistem perencanaan Pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan kinerja dibidang urusan penanaman modal, sehingga di tahun 2025 perlu dilakukan inovasi pelayanan

perizinan dan kemudahan berusaha, secara khusus dengan telah
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Fasilitas/Insentif
Pelaku Usaha dan Kemudahan Berusaha yang telah disusun di
tahun 2024 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
pengembangan iklim penanaman modal.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI